

MODEL RESOLUSI KONFLIK ANTARA BALAI TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS DENGAN MASYARAKAT DESA SEKITARNYA

(Kasus di Desa Braja Yekti, Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur)

SUMARYO GS

*Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian
Universitas Lampung, Bandar Lampung, Telp/Fax. (0721) 773481,
Email: mario_papapanji@yahoo.com*

ABSTRACT

Abundant of natural resources can attract the surrounding people to pose and manage, as this is because of limited resources scarcity possessed by community. This condition can be as a trigger of conflict between Way Kambas National Park on the one hand and the surrounding people on the other hand who live as a neighbor. This research aims are to identify the cause of conflict between Way Kambas National Park (TNWK) and that surrounding peoples, and to formulate that conflict resolution. SWOT analysis is used to formulate the conflict resolution strategy. The research shows that: (1) the root of conflict is the management grab of natural resource; (2) the strategy of conflict resolution can be more effectively implemented by participated that surrounding peoples on the decision making; (3) the main of conflict resolution strategy is by giving that surrounding peoples many productive activities to manage their natural resources.

Keywords: conflict resolution, Way Kambas National Park (TNWK)

ABSTRAK

Keberadaan sumberdaya alam yang melimpah dapat menjadi daya tarik masyarakat untuk memiliki atau mengelolanya, hal ini disebabkan masyarakat menghadapi masalah minimnya sumberdaya alam yang mereka kuasai. Kondisi tersebut dapat memicu timbulkan konflik antara Balai Taman Nasional Way Kambas di satu pihak dan masyarakat sekitar di lain pihak yang hidup bertetangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab timbulnya konflik antara Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dengan masyarakat di sekitarnya, serta untuk mencari formulasi pemecahan konflik tersebut. Untuk memformulasi strategi resolusi konflik digunakan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) akar masalah munculnya konflik adalah perebutan pengelolaan sumberdaya alam antara masyarakat dengan pihak Balai TNWK; (2) strategi resolusi konflik akan lebih efektif diterapkan dengan melibatkan masyarakat sekitar dalam pengambilan keputusan; (3) strategi resolusi konflik menekankan pada pemberian aktivitas ekonomi produktif masyarakat sekitar taman untuk mengelola sumberdaya alam yang ada.

Kata kunci; resolusi konflik, Taman Nasional Way Kambas (TNWK)

PENDAHULUAN

Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dengan luas 125.621,30 hektar telah ditetapkan sebagai kawasan pelestarian alam menurut SK Menteri Kehutanan Nomor 670/Kpts-II/1999, dengan demikian kawasan ini mutlak perlu dijaga kelestariannya. TNWK secara administratif termasuk ke dalam tiga wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Tulang Bawang yang meliputi 10 Kecamatan dan 35 desa. Program pelestarian TNWK juga dikaitkan dengan upaya mewujudkan dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

TNWK merupakan salah satu kawasan konservasi di Indonesia yang mempunyai tiga aspek utama yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan satwa beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari (UU No.5 Tahun 1990 tentang KSDA&E). Keberhasilan pengelolaan TNWK harus dikaitkan dengan target

sukses pembangunan kehutanan yang mencakup: (1) Pemberantasan illegal logging, (2) Revitalisasi industri kehutanan; (3) Rehabilitasi hutan dan lahan; (4) Pengembangan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan; (5) Pemantapan kawasan, dan (6) Mencegah kebakaran hutan dan lahan.

Dalam kehidupan bermasyarakat, keberadaan masyarakat sekitar TNWK dapat menjadi pengganggu atau sebaliknya dapat menjadi pengaman keberadaan TNWK. Namun, karena panjangnya batas TNWK dengan desa-desa sekitarnya kemampuan aparat Balai TNWK sangat tidak memadai. Oleh karena itu, paradigma baru pengelolaan taman nasional memberikan harapan baru bagi keberlangsungan keberadaan taman nasional. Pelibatan masyarakat sekitar dalam pengamanan taman nasional diharapkan mendapat dukungan dari semua pihak.

Keberadaan masyarakat sekitar TNWK yang selama ini lebih berperan sebagai pengganggu kemungkinan

disebabkan oleh beberapa hal, seperti: kurangnya kesadaran masyarakat akan fungsi dan peranan taman nasional; ketiadaan manfaat ekonomi keberadaan TNWK yang dirasakan masyarakat sekitar; rendahnya kondisi ekonomi masyarakat sekitar sehingga mereka masuk TNWK; rendahnya aktivitas lembaga desa dalam menanggulangi kebakaran hutan dan pelanggaran masyarakat di TNWK; belum adanya kesepakatan antara Balai TNWK dengan desa-desa yang berbatasan langsung dengan TNWK.

Gangguan dari masyarakat terhadap TNWK antara lain perambahan hutan dengan penebangan pohon dalam kawasan, pemancingan dan penangkapan ikan di sungai-sungai dalam kawasan, serta penggembalaan ternak (kerbau dan sapi) secara liar dalam kawasan. Secara umum gangguan tersebut disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat sekitar yang masih miskin, hal ini sesuai dengan kondisi sosial ekonomi desa-desa tersebut yang termasuk desa miskin (desa yang mendapatkan bantuan dana Inpres Desa Tertinggal).

Di lain pihak, keberadaan satwa liar yang hidup dalam kawasan TNWK, terutama gajah, sering mengganggu masyarakat sekitar. Kelompok gajah dari kawasan sering masuk wilayah desa sekitar dan merusak tanaman pertanian masyarakat sekitar, bahkan beberapa kali kejadian mengakibatkan kematian petani yang menjaga tanamannya. Tanaman pertanian yang sering menjadi sasaran gajah antara lain tanaman jagung. Masyarakat atau petani tidak dapat berbuat banyak, mereka hanya dapat mengusir gajah-gajah tersebut kembali ke dalam kawasan, sebab mereka akan mendapat hukuman yang berat bila sampai membunuh gajah-gajah tersebut yang nyata-nyata merusak tanaman mereka. Kerugian material atau ekonomi yang mereka alami tidak pernah mendapatkan perhatian atau kompensasi dari pihak pengelola TNWK. Hal tersebut disebabkan ketiadaan anggaran untuk ganti rugi kerusakan akibat ulah hewan satwa. Tuntutan secara legal dilakukan oleh kelompok masyarakat kepada Kepala Balai TNWK, namun selalu mendapatkan jawaban bahwa pihak Balai TNWK tidak ada pos anggaran untuk ganti rugi kerusakan akibat ulah satwa liar.

Secara diam-diam masyarakat desa sekitar tersebut secara perorangan atau berkelompok masuk kawasan sebagai pencari ikan, dengan cara memancing atau menjaring ikan. Masyarakat melakukan kegiatan tersebut dilakukan dengan cara menginap atau membuat "umbul" dalam kawasan. Di saat itulah mereka membakar obat nyamuk, mereka lupa akan bahayanya di saat musim kemarau. Akibatnya sering terjadi kebakaran hutan dalam kawasan akibat ulah manusia, baik yang disengaja maupun karena keteledoran manusia.

Kegiatan ilegal tersebut kelompok masyarakat tersebut tercium oleh aparat Balai TNWK, patroli rutin yang dilakukan oleh satuan tugas polisi kehutanan (Polhut) sudah sering mendapati pelaku dan menangkapnya. Polhut secara semena-mena merampas dan memusnahkan perlengkapan dan peralatan yang digunakan oleh para pencari ikan, seperti sepeda, jaring, bubu, kail, dan sebagainya. Selanjutnya polhut secara prosedural

menyerahkan pelaku kepada aparat kepolisian setempat. Namun apa yang terjadi justru menyalahi koridor hukum, pelaku dilepaskan dengan catatan imbalan atau tebusan dengan sejumlah uang. Kejadian ini selalu berulang sehingga menimbulkan kegeraman masyarakat untuk selalu mengganggu keberadaan TNWK. Data citra satelit menunjukkan bahwa titik api (*hot spot*) di kawasan TNWK ada di sepanjang jalur perbatasan dengan desa-desa sekitar atau desa penyangga.

Salah satu desa penyangga TNWK adalah desa Braja Yekti, secara administratif masuk ke dalam wilayah Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur. Masyarakat di Desa Braja Yekti berasal dari Jawa dan Bali dan mulai bermukim di desa ini sejak tahun 1959. Asal daerah antara lain dari Trenggalek, Blitar, Kediri, Jawa Barat, dan Bali.

Sebagai dua komunitas yang hidup bertetangga semestinya dapat hidup rukun dan saling membantu, namun kenyataannya dalam kasus yang terjadi di Desa Braja Yekti, konflik yang bersifat laten masih terpendam, dan konflik yang bersifat terbuka pernah terjadi antara masyarakat desa tersebut dengan pihak pengelola TNWK. Demi kelangsungan hidup kedua komunitas, upaya mengatasi konflik kedua belah pihak harus diupayakan secara sungguh-sungguh. Kondisi ideal suatu masyarakat semestinya dalam keadaan damai, mereka hidup bersemangat dan dinamis. Namun kondisi ideal tersebut jarang kita temukan, meskipun ada hal itu terjadi karena konflik perilaku dan tujuan anggota masyarakatnya dapat dikelola secara baik. Realita di masyarakat dimanapun, konflik itu ada, hanya saja kadarnya yang tidak sama. Berdasarkan penampakan di masyarakat, Fisher, *dkk.*, (2000) menyatakan konflik yang ada dapat kita bedakan:

- (1) Konflik laten, konflik yang terjadi sifatnya tersembunyi. Konflik demikian perlu diangkat ke permukaan agar dapat ditangani secara efektif.
- (2) Konflik terbuka, sifatnya sudah berakar dalam dan sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya.
- (3) Konflik di permukaan, memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi.

Ada empat kondisi yang menimbulkan konflik:

- (1) Adanya kelompok-kelompok yang terorganisasi, misalnya kelompok sukarela, keagamaan, keluarga, suku atau lainnya.
- (2) Adanya interaksi diantara anggota-anggota kelompok tersebut. Tanpa kontak/ komunikasi maka tidak akan ada konflik. Kontak dapat berupa propaganda tentang orang, kebudayaan atau kelompok lain.
- (3) Adanya perbedaan posisi yang menunjukkan hirarkhi, yang ditempati oleh anggota-anggota kelompok.
- (4) Adanya kelangkaan sumberdaya yang dibutuhkan atau diinginkan dan ketidakpuasan yang merata tentang distribusi sumberdaya tersebut.

Menurut Fisher, *dkk* (2000) sebab-sebab terjadinya konflik dalam masyarakat dapat dikaji dengan beberapa teori berikut.

Group Discussion (FGD) dan *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Analisis SWOT digunakan untuk merumuskan strategi pemecahan masalah. Data yang terkumpul dianalisis secara diskriptif untuk menjawab tujuan penelitian.

HASIL PENELITIAN

Kondisi sumberdaya alam yang ada pada setiap dusun di Desa Braja Yekti hasil wawancara dengan 5 kepala dusun disajikan pada Tabel 1. Potensi sumberdaya alam tersebut belum dikelola secara optimal, lahan ladang dan rawa sebagian besar belum digarap oleh warga setempat.

Saat ini, jumlah KK dan penduduk setiap dusun di Desa Braja Yekti terdiri dari: (1) Yekti Mekar: 122 KK dan 599 jiwa; (2) Yekti Melati: 122 KK dan 504 jiwa; (3) Trimurti: 115 KK dan 533 jiwa; (4) Dwi Yekti: 162 KK dan 654 jiwa; (5) Daya Harum: 191 KK dan 953 jiwa. Secara keseluruhan penduduk Braja Yekti sebanyak 3.273 jiwa yang terdiri dari 773 KK. Berdasarkan tingkat pendidikannya, penduduk Braja Yekti 1.269 tamat SD, 953 tamat SLTP, dan 762 tamat SLTA.

Tabel 1. Keadaan umum penggunaan lahan setiap dusun Desa Braja Yekti

No.	Penggunaan lahan	Yekti Mekar (ha)	Yekti Melati (ha)	Trimurti (ha)	Dwi Yekti (ha)	Daya Harum (ha)	Desa (ha)
1.	Pekarangan	16	18	20	23	28	105
2.	Ladang	8	6	21	101	228	364
3.	Sawah	41	36	22	46	116	261
4.	Rawa	6	32	26	58	88	210
5.	Tegalan	2	4	4	6	-	16
	Jumlah	73	86	93	236	459	956

Sumber : Programa Penyuluhan Pertanian Kecamatan Braja Selehah, 2008

Dari kronologi sejarah desa yang dipaparkan oleh beberapa tokoh masyarakat, tokoh adapt, dan tokoh agama setempat dapat dipahami bahwa kondisi masyarakat Desa Braja Yekti semenjak berdiri sampai tahun 1983 terasa harmonis, namun semenjak tahun 1984 kondisi masyarakat desa tersebut mulai terusik oleh kehadiran gajah yang tidak diundang dari kawasan TNWK. Kehadiran gajah selalu merusak tanaman pertanian milik warga, sementara masyarakat tidak boleh membunuh gajah karena mereka termasuk satwa langka yang dilindungi Undang-undang. Kejadian ini berlangsung secara berulang setiap waktu menjelang petani memanen tanamannya. Keluhan masyarakat kepada pengelola TNWK selalu mendapatkan jawaban yang bersifat klasik, bahwa Balai TNWK tidak memiliki tenaga dan dana yang cukup untuk mengatasi masalah tersebut.

Seiring dengan terjadinya penurunan kualitas sumberdaya alam Desa Braja Yekti dan era reformasi yang terjadi di negara ini, masyarakat desa tersebut menjadi berani masuk kawasan dengan dalih mereka ingin mendapatkan ganti rugi dari kerusakan tanaman pertanian siap panen milik mereka yang dirusak gajah. Mereka masuk kawasan secara ilegal secara sendiri-sendiri atau secara berkelompok untuk mencari ikan dengan cara memancing dan menjaring atau memasang bubu (perangkap penangkap ikan). Selain itu mereka

juga ada yang mencari (menebang) kayu gaharu. Tindakan oknum anggota masyarakat (kelompok masyarakat) tersebut diketahui oleh pengelola TNWK, sehingga mereka mengadakan patroli rutin di sepanjang perbatasan kawasan TNWK terhadap perorangan atau kelompok yang masuk kawasan tanpa ijin. Hasil patroli sering mendapati warga melakukan aktivitas tersebut di atas. Polhut bertindak dengan merampas peralatan yang digunakan dan hasil tangkapan ikan oknum tersebut. Namun ternyata masyarakat mendapati, hasil tangkapan bukan dimusnahkan, tetapi diambil dan dijual oleh oknum polhut ke pasar terdekat (Pasar Way Jepara). Tindakan semena-mena polhut terhadap masyarakat menimbulkan kebencian dan rasa dendam masyarakat karena mereka tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Akibatnya masyarakat menempuh perlawanan secara sembunyi-sembunyi, mereka melakukan sabotase, yang puncaknya terjadi pada tahun 2004. Sabotase masyarakat dilakukan dengan sengaja membuang puntung rokok atau obat nyamuk bakar di tengah alang-alang yang kering di musim kemarau. Akibatnya banyak terjadi kasus kebakaran hutan dalam kawasan TNWK, hal ini sesuai data citra satelit Landsat yang mencatat bahwa *hot-spot* (titik api panas) di kawasan taman nasional se Indonesia pada tahun 2004 paling banyak ada di kawasan TNWK bagian selatan yang berbatasan dengan wilayah Desa Braja Yekti, Kecamatan Braja Selehah.

Saat ini, pengelola TNWK melalui Kepala Balai TNWK telah menyadari bahwa untuk mengatasi konflik laten antara masyarakat dan Balai TNWK harus dicari solusinya secara arif. Pihak Balai TNWK mengundang berbagai pihak termasuk perguruan tinggi, LSM, dan masyarakat untuk memberikan masukannya.

Model Pemecahan Masalah Konflik Pengelolaan Sumberdaya antara Balai TNWK dengan Masyarakat Desa Sekitarnya

Menurut Hill dan Kerber (1967) model adalah representasi sebuah subyek, yang sedang diselidiki, misalnya suatu objek, proses, atau sistem, yang akan digunakan untuk mengendalikan, meramalkan dan membuat keputusan. Selanjutnya Hill dan Kerber menyatakan bahwa ada tiga macam model, yaitu: *Model ikonik*, *Model analog*, dan *Model simbolik*. Dalam tulisan ini model yang akan dikembangkan adalah model yang kedua yaitu model analog yang berupa bagan alir, atau representasi sebuah sistem yang sedang dipelajari, dengan menggambarkan seperangkat bagian-bagian sistem tersebut yang isomorfik.

Langkah awal dalam menyusun model didahului dengan melakukan analisis situasi, termasuk identifikasi potensi sumberdaya alam TNWK maupun sumberdaya alam di wilayah Desa Braja Yekti. Langkah awal yang dapat ditempuh antara lain:

- 1) Melakukan identifikasi persepsi masyarakat sekitar tentang TNWK dan pengelolaannya.
- 2) Melakukan identifikasi tentang persepsi masyarakat tentang sumberdaya alam di wilayah desa yang mempunyai potensi ekonomi untuk dikembangkan.

Tabel 2. Analisis SWOT Kondisi Sosial Ekonomi Desa Braja Yekti

	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lahan pekarangan dan tegalan yang ditanami kakao belum diusahakan secara intensif. 2. Potensi lahan tidur di wilayah desa masih cukup luas di sepanjang perbatasan dengan TNWK. 3. Potensi usaha perikanan sepanjang Sungai Penet. 4. Masyarakat Desa Braja Yekti mempunyai sifat kooperatif terhadap pihak luar yang mau bekerjasama. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebiasaan menggembala ternak kerbau / sapi sampai masuk kawasan hutan TNWK sehingga merusak habitat taman nasional. 2. Tingkat penguasaan teknologi budidaya kakao masih rendah. 3. Kebiasaan masyarakat menangkap / memancing ikan, belum mau membudidayakan. 4. Tingkat penguasaan usaha ternak kerbau / sapi secara intensif belum dikuasai.
PELUANG (O)	S-O	W-O
<ol style="list-style-type: none"> 1. Harga kakao di tingkat dunia semakin mantap. 2. Konsumsi dan permintaan daging sapi semakin meningkat dan penetapan Lampung sebagai lumbung ternak besar bagi Jabodetabek. 3. Kesadaran pola konsumsi masyarakat yang bergizi 4. Perubahan kebijakan pengelolaan TNWK mengarah pada pelibatan masyarakat desa sekitar. 5. Pengembangan TNWK sebagai kawasan wisata alam dan wisata budaya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan lahan pekarangan dan tegalan untuk pengembangan budidaya kakao secara intensif. 2. Pemanfaatan lahan tidur untuk penanaman rumput gajah sebagai pakan ternak. 3. Pemanfaatan sepanjang bibir Sungai Penet untuk pengembangan budidaya ikan dalam karamba apung. 4. Rekrutmen anggota Brigade anti kebakaran hutan dari anggota masyarakat Desa Braja Yekti. 5. Kerjasama antara desa dengan Balai TNWK dalam pengembangan wisata alam dan wisata budaya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundangan yang menyangkut masalah kehutanan. 2. Membuat kesepakatan / peraturan hubungan masyarakat desa dengan TNWK serta meningkatkan kerjasama kelembagaan desa dengan Balai TNWK. 3. Penyuluhan dan bimbingan teknis budidaya kakao secara intensif. 4. Penyuluhan dan bimbingan usaha ternak kerbau / sapi secara semi intensif atau intensif. 5. Penyuluhan dan bimbingan teknis budidaya ikan dalam karamba apung di sepanjang bibir Sungai Penet.
HAMBATAN (T)	S-T	W-T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perilaku satwa liar (gajah) sering merusak tanaman pertanian milik petani. 2. Peraturan peundangan melarang kawasan taman nasional untuk dijamah manusia. 3. Perilaku oknum Polhut yang over-acting dalam menangani kasus pelanggaran oleh masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan kepada Balai TNWK untuk menangani perilaku satwa liar dengan penanaman pohon eksotik dan MPTS sepanjang jalur batas TNWK dengan wilayah desa melibatkan masyarakat sekitar dan bibit pohon disediakan oleh Balai TNWK. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pelarangan masyarakat memancing dan menangkap ikan di kawasan ikan dilakukan secara bertahap. 2. Pelatihan pendekatan partisipatif bagi para petugas dan Polhut Balai TNWK.

- 3) Identifikasi persepsi petugas dan Polisi Penjaga Hutan (Polhut) Balai TNWK terhadap keberadaan masyarakat desa sekitar.
- 4) Perumusan masalah yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya TNWK dan sumberdaya alam Desa Braja Yekti.

Dari berbagai data yang diperoleh secara partisipatif tersebut, peneliti bersama tim fasilitator dapat membantu masyarakat Desa Braja Yekti dalam mengidentifikasi adanya faktor-faktor kekuatan, kelemahan yang dihadapi. Faktor kekuatan (S) dan faktor kelemahan (W) merupakan faktor internal yang ada di desa Braja Yekti. Setelah itu dilakukan analisis faktor eksternal yang merupakan faktor peluang (O) dan tantangan (T). Dari berbagai faktor yang ada kemudian dilakukan analisis SWOT (Tabel 2).

Dari hasil analisis SWOT kondisi sosial ekonomi Desa Braja Yekti dapat digunakan untuk merumuskan program (jangka pendek /2009, jangka menengah /2009-2013, dan jangka panjang /2009-2033). Dari berbagai program pemecahan masalah melalui kombinasi strategi (S-O, W-O, S-T, W-T) yang terumuskan sebanyak 13 program atau kegiatan, dapat ditentukan prioritas mana yang dapat ditempuh atau dilakukan. Berbagai program yang telah disepakati dapat dijabarkan menjadi beberapa kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung melibatkan masyarakat desa Braja Yekti. Mengingat pentingnya semua program yang telah disepakati, berbagai kegiatan sebaiknya difasilitasi oleh pihak ketiga sebagai Tim Fasilitator dalam mendukung program tersebut.

Secara skematis model Resolusi Konflik antara Balai TNWK dengan Masyarakat Desa Braja Yekti Kecamatan

Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur disajikan pada bagan terlampir. Dari model tersebut, tahapan yang perlu dilakukan untuk mengatasi konflik antara Balai TNWK dengan masyarakat Desa Braja Yekti adalah sebagai berikut.

1) Pendekatan ke pihak Balai TNWK (Langkah V.a.1)

Upaya ini ditempuh sebagai upaya penyelesaian konflik yang diakibatkan oleh pola pendekatan pengelolaan TNWK yang bersifat birokratis. Pendekatan kepada pihak Balai TNWK dapat dilakukan oleh pihak ketiga (*sebagai fasilitator*) ataupun oleh pihak masyarakat (kelompok masyarakat) yang merasa dirugikan oleh ulah satwa dan atau ulah para oknum Polhut.

2) Usul penambahan tenaga Polhut ke Departemen Kehutanan (Langkah V.a.2.)

Balai TNWK secepatnya membuat usulan untuk penambahan jumlah personil Polhut bagi kepentingan penjagaan kelestarian TNWK. Peningkatan kuantitas Polhut diharapkan mampu mengeliminir konflik atau permasalahan gangguan oleh masyarakat sekitar terhadap keberadaan TNWK.

3) Pelatihan bagi para petugas (Polhut) Balai TNWK tentang pendekatan partisipatif (Langkah V.a.3.)

Polhut seharusnya dibekali pengetahuan, sikap, dan keterampilan tentang pendekatan partisipatif. Hal ini dimaksudkan agar dalam penanganan konflik atau masalah yang muncul yang diakibatkan oleh ulah masyarakat dapat dicarikan solusinya secara partisipatif. Namun demikian, kebijakan dari tingkat Balai TNWK juga harus mendukung kebijakan di tingkat lapangan. Oleh karenanya para pimpinan di tingkat Balai (eselon

III) juga harus dibekali dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan tentang pendekatan partisipatif.

4) Penyuluhan dan pelatihan usahatani kakao, usaha perikanan, dan peternakan kerbau/sapi secara semi-intensif/intensif (Langkah V.b.1.)

Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengalihkan energi yang ada pada masyarakat sekitar kawasan untuk hal-hal yang bersifat lebih produktif dan tidak merugikan pihak lain, terutama TNWK. Hal ini juga sekaligus agar masyarakat memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan kemauan untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang ada di wilayah desanya secara lebih intensif.

5) Bimbingan teknis usahatani kakao, usaha perikanan, dan peternakan kerbau/sapi secara semi intensif/intensif (Langkah V.b.2.)

Semua upaya penyuluhan dan pelatihan yang telah diberikan kepada masyarakat harus ditindaklanjuti dengan memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat. Bimbingan teknis diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimilikinya. dalam implementasi di lapangan, biasanya mereka akan menghadapi kendala permodalan. Oleh karena itu fasilitator harus mampu membantu petani/peternak dan menghubungkan mereka dengan pemilik modal, seperti pihak swasta atau perbankan. Akan lebih baik lagi bila pihak Balai TNWK mempunyai andil dalam pinjaman permodalan bagi masyarakat yang sifatnya bergulir (*revolving capital*). Keterlibatan Balai TNWK akan meningkatkan citra lembaga pengelola TNWK dimata masyarakat desa sekitar, sehingga masyarakat akan merasa segan untuk berperilaku yang merugikan TNWK.

6) Sosialisasi dan atau Penyuluhan tentang peraturan perundangan yang terkait dengan kehutanan (Langkah VI)

Masyarakat menganggap bahwa hutan adalah milik negara, sehingga mereka sebagai warga negara juga berhak untuk memanfaatkan sumberdaya hutan yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu perlu diambil tindakan secepatnya dengan melakukan sosialisasi dan atau penyuluhan tentang peraturan perundangan yang terkait dengan kehutanan kepada masyarakat Desa Braja Yekti khususnya, dan masyarakat desa-desa di sepanjang perbatasan kawasan TNWK. Akan lebih baik lagi bila kebijakan ini dilanjutkan dengan pendidikan wawasan kehutanan kepada generasi muda dan anak-anak dengan *memasukkan pendidikan pelestarian lingkungan dalam kurikulum pendidikan dasar*. Hal ini dimaksudkan agar nilai-nilai pelestarian hutan sudah tertanam pada anak sejak dini, sehingga nantinya setelah dewasa mereka tidak akan bertindak yang dapat mengakibatkan kerusakan hutan di sekitarnya. Kebijakan ini tentu harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk para wakil rakyat (anggota dewan) di setiap tingkatan.

Secara teknis, kebijakan di lapangan dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan spanduk atau poster di tem-

pat-tempat strategis di wilayah Desa Braja Yekti dan desa-desa sekitar yang berbatasan dengan TNWK yang menyantumkan tindakan terlarang beserta sanksinya bila seseorang melakukan pengrusakan terhadap sumberdaya alam di dalam kawasan TNWK. Bagi anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dapat diberikan brosur-brosur atau leaflet tentang fungsi dan manfaat hutan bagi kehidupan manusia, tindakan-tindakan melawan hukum yang terkait dengan hutan, dan sebagainya.

7) Fasilitasi pertemuan (musyawarah) antara Balai TNWK dengan masyarakat Desa Braja Yekti (Langkah VII)

Sebagai langkah awal sebelum digelarnya musyawarah tersebut adalah mendorong munculnya lembaga sosial yang dapat mewakili aspirasi masyarakat. Lembaga sosial yang dikembangkan tersebut bukan berarti mengabaikan lembaga formal yang sudah ada seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Badan Perwakilan Desa (BPD). Secara kebetulan kedua lembaga formal yang sudah ada banyak dikeluhkan oleh warga kurang dapat mewakili aspirasi masyarakat bawah. Terbentuknya lembaga sosial yang benar-benar mewakili aspirasi masyarakat dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berpihak kepada mereka.

Fasilitasi pertemuan antara Balai TNWK dengan masyarakat dapat dilakukan oleh pihak ketiga. Fasilitasi ini diharapkan dapat menjembatani komunikasi antara kelompok masyarakat Desa Braja Yekti dengan pengelola TNWK dengan prinsip kesetaraan. Kesan selama ini menunjukkan bahwa pihak Balai TNWK mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada masyarakat sekitar, sementara mereka memiliki keterbatasan. Dengan musyawarah dalam satu forum yang dirancang oleh pihak ketiga (fasilitator) dapat diidentifikasi akar permasalahan yang menjadi pemicu munculnya konflik antara masyarakat dengan pihak Balai TNWK.

8) Perumusan kesepakatan antara Balai TNWK dengan masyarakat Desa Braja Yekti (Langkah VIII)

Dengan musyawarah antara Balai TNWK dengan masyarakat Desa Braja Yekti diharapkan mampu melahirkan kesepakatan yang bersifat sementara maupun permanen dalam mengatasi konflik antara masyarakat dengan Balai TNWK. Musyawarah yang digelar diharapkan mampu:

- a) Merumuskan kesepakatan / peraturan hubungan masyarakat desa dengan TNWK serta meningkatkan kerjasama kelembagaan desa dengan Balai TNWK. Rumusan kesepakatan tersebut diharapkan mencakup penyelesaian masalah ganti rugi kerusakan tanaman akibat ulah gajah, masalah penanggulangan kebakaran hutan secara partisipatif, masalah lintas batas TNWK oleh warga desa Braja Yekti, masalah penggembalaan liar ternak kerbau atau sapi milik warga di dalam kawasan TNWK, dan masalah pengambilan ikan oleh warga dalam kawasan TNWK.
- b) Merumuskan kebijakan pelarangan masyarakat memancing dan menangkap ikan di kawasan ikan dilakukan secara bertahap. Kebijakan ini diharapkan

dapat dilakukan secara bertahap, yang pada akhirnya masyarakat tidak lagi masuk kawasan untuk menjaring atau memancing ikan di dalam kawasan. Langkah awal misalnya dilakukan pendataan pemancing dari desa Braja Yekti, dilanjutkan pemberian surat ijin memancing selama setahun kepada masyarakat yang terdaftar, setelah itu ijin berakhir pemberlakuan aturan ditegakkan. Pemberian ijin memancing terbatas untuk jenis-jenis ikan yang tidak dilindungi. Ijin selama setahun dipertimbangkan untuk memberikan kesempatan para pemancing mencari alternatif pekerjaan lain. Setelah berakhirnya masa ijin memancing diharapkan keberadaan TNWK sudah bebas dari gangguan masyarakat sekitar.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Munculnya konflik antar komponen dalam suatu sistem sosial di wilayah Desa Braja Yekti, Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung berawal dari adanya perebutan pengelolaan sumberdaya alam TNWK.
2. Konflik pemanfaatan sumberdaya alam TNWK harus diselesaikan melalui proses negosiasi dengan prinsip kesetaraan antara Balai TNWK dengan masyarakat desa di sekitarnya. Penyelesaian konflik akan lebih optimal bila dalam pengambilan kebijakan dan implementasinya melibatkan masyarakat sekitar.
3. Pemecahan konflik pemanfaatan sumberdaya alam TNWK dapat dilakukan dengan menciptakan

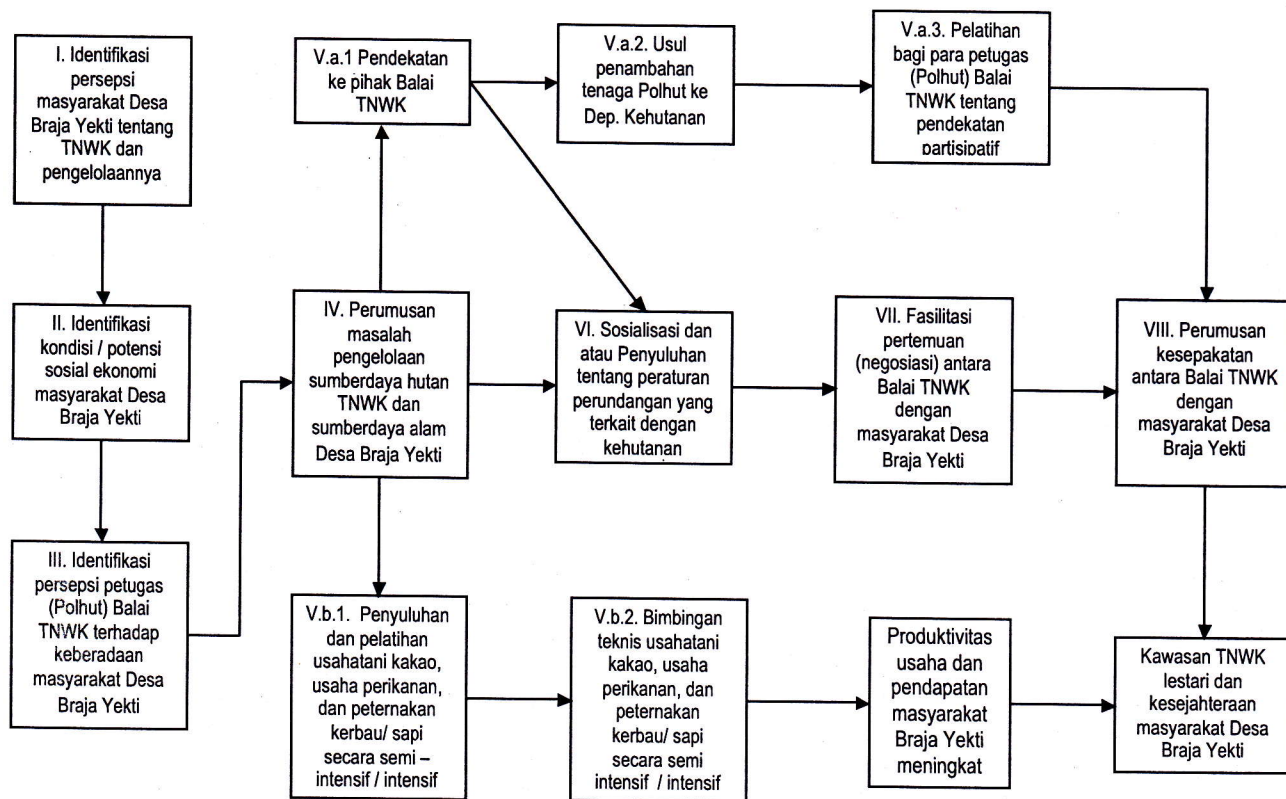
kesibukan masyarakat dalam aktivitas pemanfaatan sumberdaya lahan di desa setempat untuk usaha ekonomi produktif yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sehingga mereka tidak lagi mengganggu kelestarian TNWK.

Rekomendasi

1. Kepada pihak Balai TNWK agar mengubah orientasi pemecahan yang bersifat represif menjadi pemecahan masalah yang bersifat persuasif dan partisipatif. Kebijakan tersebut harus didukung dengan penambahan jumlah Polhut yang dibekali kemampuan untuk melakukan pendekatan partisipatif di masyarakat.
2. Penyuluhan dan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam melalui usaha ekonomi produktif harus didukung dengan pemberian kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses perbankan dalam memperoleh sumber permodalan.

DAFTAR PUSTAKA

Carry, L.J. (ed). 1978. *Community Development as a Process*. University of Missouri Press, Columbia.
 Fisher, S. dkk. 2000. *Mengelola Konflik Keterampilan & Strategi untuk Bertindak*. Alih Bahasa: S.N. Kartikasari dkk. The British Council Indonesia, Jakarta.
 Turner, J.H. 1978. *The Structure of Sociological Theory*. The Dorsey Press. Homewood, Illinois.
 Vago, S. 1989. *Social Change*. Prentice Hall. Englewood Cliffs, New Jersey.



Lampiran: Model Resolusi Konflik antara Balai TNWK dengan Masyarakat Sekitarnya